

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Manajemen Risiko Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya ini dapat diselesaikan.

Manajemen Risiko merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalisir risiko yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Proses Manajemen Risiko dilakukan melalui tahapan yaitu, Penetapan Tujuan, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Penanganan Risiko dan Pemantauan Risiko dan Rivi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Manajemen Risiko Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Dengan telah disusunnya Laporan Manajemen Risiko ini, maka dapat dilihat gambaran risiko ketidakpastian yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam mencapai tujuan/sasaran penetapan kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan melalui pengelolaan manajemen risiko.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Laporan Manajemen Risiko ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Laporan Manajemen Risiko ini bermanfaat dan memiliki kontribusi yang baik bagi upaya pencapaian tujuan organisasi. .

Sungai Raya, 2 Desember 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kubu Raya



Drs. HERRY PURWOKO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691223 199403 1 005

BAB I GAMBARAN UMUM

A. Latar Belakang

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi resiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko adalah pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu resiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari resiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi resiko dari beberapa aktifitas manusia. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada resiko yang akan ditimbulkan. Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya juga harus dilakukan analisis manajemen risiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang berisiko tinggi, sedang dan rendah sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Diharapkan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

Dasar Hukum

Dasar Hukum Tentang Penyusunan Manajemen Risiko Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 04 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya;

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Pengendalian Risiko dilaksanakan dengan tujuan:

1. Mengidentifikasi dan menguraikan semua risiko potensial yang berasal baik dari faktor internal maupun faktor eksternal;
2. Memeringkat risiko-risiko yang memerlukan perhatian manajemen Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kubu Raya beserta jajarannya yang memerlukan penanganan segera atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut;
3. Memberikan suatu masukan atau rekomendasi untuk meyakinkan bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif;
4. Memberikan informasi tentang adanya risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya;
5. Memberikan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan suatu kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya;
6. Sebagai bahan masukan dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan penerapan risiko pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya meliputi kegiatan utama sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja yang meliputi ;

- a. Penyusunan program kerja dibidang sub urusan bencana dan urusan kebakaran
- b. Perumusan kebijakan dibidang sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
- c. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
- d. Penyelenggaraan administrasi Badan
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis Badan
- g. Pengoorganisasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi

D. Manfaat

Menciptakan kerangka kerja dan proses manajemen risiko daLam menghadapi risiko, manfaat manajemen risiko juga meningkatkan kapabilitas organisasi dalam mengejar peluang serta meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan strategis organisasi melalui penyediaan informasi yang relevan dan komprehensif.

BAB II PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola Risiko bertujuan untuk mengantisipasi dan mengendalikan setiap risiko yang ada untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif dan ekonomis dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Proses Manajemen Risiko di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Tujuan;
2. Identifikasi Risiko;
3. Analisis Risiko;
4. Evaluasi Risiko;
5. Penanganan Risiko; dan
6. Pemantauan dan Reviu.

A. Penetapan Tujuan

Merupakan tahapan untuk memahami dan menetapkan lingkup atau batasan dalam pelaksanaan manajemen risiko pada tiap unit pemilik risiko pada seluruh unit di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Pendekatan yang dilakukan adalah melalui proses diskusi dan konsinyasi untuk menentukan risiko awal, penanganan risiko, dan monitoring serta reviu terhadap manajemen risiko. Diskusi dilakukan dengan partisipasi proaktif oleh para pemilik risiko di Tingkat Unit Kerja Eselon III Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam menyusun manajemen risiko.

B. Identifikasi Risiko

Penilaian risiko merupakan rangkaian proses untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan organisasi. Setelah mengidentifikasi seluruh jenis risiko, selanjutnya dilakukan analisis risiko untuk mengetahui profil dan peta dari setiap risiko yang ada yang kemudian didokumentasikan dalam sebuah daftar risiko.

Dalam tahap ini dilakukan identifikasi kejadian-kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan/sasaran. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan proses sistematis yang terukur, baik risiko yang berada dalam kendali Organisasi (controllable) maupun risiko di luar kendali organisasi (controllable)

Dalam rangka menjamin perolehan identifikasi Risiko yang akurat, penilaian Risiko harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik Risiko yang terkait dengan kegiatan yang dinilai Risikonya. Metodologi yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedangkan keterlibatan para pemilik Risiko penting karena mereka yang mengerti kegiatan dan menjadi pihak yang terkena dampak atas kegagalan pencapaian tujuan. Langkah-langkah Identifikasi Risiko sebagai berikut :

1. Unit Pemilik Risiko mengeksplorasi berbagai kemungkinan jawaban atas pertanyaan, kejadian apa yang mungkin akan terjadi atau mungkin akan terulang terjadi, dan jika terjadi, maka akan berdampak negatif pada pencapaian tujuan/sasaran.
2. Unit Pemilik Risiko mengidentifikasi penyebab utama dan dampak negatif risiko terhadap pencapaian tujuan/sasaran untuk setiap kejadian/risiko.
3. Unit Pemilik Risiko meuangkan kejadian-kejadian ke dalam Register Risiko dan menuangkan ke dalam Register Risiko.
4. Unit Pemilik Risiko mengidentifikasi penanganan risiko yang selama ini sudah dilakukan, penting untuk melanjutkan tahap berikutnya (analisis risiko).

C. Analisis Risiko

Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, suatu risiko dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya. Risiko yang telah diidentifikasi harus dianalisis berdasarkan informasi yang akurat sehingga dapat diperoleh nilai kemungkinan dan dampak yang tepat. Ketepatan penilaian ini penting karena hasil yang diperoleh akan menentukan prioritas penanganannya. Proses ini membutuhkan proses analisis informasi dan peran serta pelaksana kegiatan yang sangat memahami proses operasionalnya dan bila dimungkinkan juga melibatkan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatannya.

Tahapan dalam pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan berikut :

1. Unit Pemilik Risiko memberikan skor kemungkinan/ frekuensi dan skor dampak untuk setiap risiko yang telah teridentifikasi. Pemberian skor dilakukan dengan mengacu kriteria kemungkinan/frekuensi dan kriteria dampak yang sudah ditentukan pada tahap penentuan konteks dengan memperhatikan penanganan risiko yang selama ini sudah dilakukan.
2. Unit Pemilik Risiko menghitung tingkat risiko untuk masing-masing risiko dengan cara mengalikan skor tingkat kemungkinan/frekuensi dengan skor tingkat dampak untuk setiap risiko.

Nilai kemungkinan terjadinya risiko diukur berdasarkan kriteria kemungkinan dan skala kemungkinan terjadinya risiko tersebut yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1 Kriteria Dan Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS	KETERANGAN
1 Jarang Terjadi	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Peristiwa diharapkan tidak terjadi ◇ Persentase 10-30%
2 Sering Terjadi	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi ◇ Persentase 31-89%
3 Hampir Pasti terjadi	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi ◇ Persentase >90%

Tabel 2. Kriteria Dan Skala Dampak Terjadinya Risiko

TINGKAT DAMPAK	KETERANGAN
1. Jarang Terjadi	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Tidak berdampak pada pencapaian tujuan/instansi secara umum ◇ Agak mengganggu pelayanan ◇ Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin ◇ Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi
2. Sering Terjadi	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan ◇ Mengganggu administrasi program
3. Hampir Pasti terjadi	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Sebagian besar tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan ◇ Terganggunya pelayanan lebih dari 3 hari ◇ Mengancam program dan organisasi serta stakeholders ◇ Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan

Dari hasil penilaian kemungkinan risiko dan dampak risiko maka dapat diketahui Tingkat Risiko dan Status Risiko tersebut dengan rincian sebagai berikut :

a. Tingkat Risiko dapat diketahui dengan rumus berikut:

$$\text{Tingkat Risiko} = \text{Skor Kemungkinan} \times \text{Skor Dampak}$$

b. Skala status risiko ditentukan sebagai berikut :

Tabel 3 Analisis Risiko

Matrik Analisis Risiko			DAMPAK		
			1	2	3
			Rendah	Sedang	Tinggi
KEMUNGKINAN	3	Hampir Pasti Terjadi	3	6	9
	2	Sering Terjadi	2	4	6
	1	Jarang Terjadi	1	6	3

Tabel 4 Status Risiko

WARNA	LEVEL	LEVEL DIMULAI DARI STATUS RISIKO	DESKRIPSI STATUS RISIKO
Merah	3	6	Tinggi
Kuning	2	3	Sedang
Hijau	1	1	Rendah

Output Analisis Risiko adalah Status dan Peta Risiko. Status Risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang Risiko, referensi dan nilai kemungkinan, referensi dan nilai dampaknya, serta tingkat dan penjelasannya. Sedangkan Peta Risiko adalah suatu penggambaran dari masing-masing Risiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam Matrik Peta Risiko sehingga akan diperoleh

informasi pada area mana Risiko tersebut berada. Rincian yang dihasilkan dalam tahapan analisis risiko tersebut berupa :

- 1) Identifikasi akar permasalahan;
- 2) Penentuan tingkat Risiko, profil Risiko atau peta Risiko; dan
- 3) Masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai opsi penanganan Risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.
 - a. Analisis Risiko di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan tahapan Identifikasi Risiko yang telah diuraikan sebelumnya, maka diketahui terdapat beberapa Risiko yang diidentifikasi dapat menghambat maupun menggagalkan tujuan dan capaian kinerja di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya. Risiko yang telah diidentifikasi tersebut kemudian dilakukan proses analisis risiko dengan menguraikan seluruh risiko kedalam Tabel Peta Risiko. Berikut tahapan analisis risiko di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya periode tahun 2024 :

D. Evaluasi Risiko

Tahapan selanjutnya yaitu proses Evaluasi Risiko sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya. Tahap pelaksanaan evaluasi risiko meliputi kegiatan :

1. Menetapkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko;
2. Melakukan evaluasi risiko secara berkala.

Hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko antara lain :

1. Risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
2. Skala Prioritas penanganan risiko; dan
3. Besarnya dampak penanganan risiko. Tahapan Evaluasi Risiko menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil evaluasi risiko yang berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani, serta menentukan indikator risiko.

Dalam proses menentukan indikator risiko dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan toleransi risiko yang berisi frekuensi dan dampak yang diharapkan/dapat diterima sesuai kategori dan kriteria Risiko;
2. Menentukan indikator Risiko yang merupakan pernyataan kuantifikasi terjadinya penyebab sisa Risiko dan batas aman dalam melakukan penanganan Risiko.

E. Penanganan Risiko

Penanganan Risiko dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) atau lebih pilihan aktivitas, dimana rumusan rencana penanganan Risiko dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan opsi penanganan risiko yang akan dijalankan melalui :
 - a. Mengurangi kemungkinan dan/atau menurunkan dampak terjadinya risiko, yaitu penanganan terhadap penyebab risiko agar peluang terjadinya risiko dan/atau dampaknya semakin kecil. Pilihan ini dapat diambil dalam hal penyebab risiko tersebut berada dalam kendali Unit Pemilik Risiko.
 - b. Mengalihkan Risiko, yaitu penangan risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh risiko, baik penyebab dan/atau dampaknya, ke entitas baik internal maupun eksternal lainnya. Opsi ini diambil dalam hal :
 - 1) Pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan memahami tingkat risiko atas kegiatan tersebut;
 - 2) Proses mengalihkan risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3) Penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik risiko.
 - c. Menghindari Risiko, yaitu penanganan risiko dengan mengubah/menghilangkan sasaran dan/atau kegiatan untuk menghilangkan risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila :
 - 1) Upaya penurunan level risiko di luar kemampuan organisasi;
 - 2) Sasaran atau kegiatan yang terkait risiko tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi;
 - 3) Penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik risiko.

- d. Menerima Risiko, yaitu penanganan risiko dengan tidak melakukan Tindakan apapun terhadap risiko tersebut. Opsi ini diambil dalam hal :
- 1) Upaya penurunan tingkat risiko di luar kemampuan organisasi;
 - 2) Sasaran atau kegiatan yang terkait risiko tersebut merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan fungsi organisasi; dan
 - 3) Penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik risiko. Opsi penanganan risiko dapat berupa kombinasi beberapa opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Prioritas opsi penanganan risiko yang dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi penanganan sebagaimana tersebut di atas.

F. Pemantauan dan Rivi

Pemantauan dan Rivi merupakan tahapan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi organisasi dalam mencapai sasarannya serta umpan balik untuk penyempurnaan sistem manajemen risiko. Tahapan Pemantauan dan Rivi dilaksanakan oleh manajemen atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penanganan risiko tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko dan usulan perbaikan telah dilaksanakan sesuai rencana penanganan risiko. Adapun tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu meliputi:

- a. Pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan antara pernyataan risiko, pengendalian yang ada, dan rencana tindak pengendalian dengan hasil yang diharapkan;
- b. Pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap-tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
- c. Pemantauan dan reviu dilakukan dengan memeriksa ukuran-ukuran dan parameter yang telah ditetapkan.

Output dari hasil Pemantauan dan Rivi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Lampiran Register Risiko.

BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Manajemen Risiko Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan kinerja yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan dokumen ini, kami mengucapkan terima kasih, kami berharap agar dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Sungai Raya, 2 Desember 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kubu Raya



Drs. HERRY PURWOKO, M.Si
Perwakilan Utama Muda
NIP. 19691223 199403 1 005

REGISTER RESIKO 2024

No.	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Sebab	UC/C	Dampak	Pengendalian yang ada					Probabilitas	Dampak	Tingkat Risiko (TR)	Peringkat Risiko (PR)	RTP		Pemilik Risiko	
							Uraian	Desain		Efektifitas						Rencana Tindak Pengendalian			
								A	T	TE	KE								E
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
SEKRETARIAT																			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tertundanya RKA, DPA dan Dokumen Pendukung Lainnya	Karena Perpindahan Sistem Keuangan dari Simakda Ke SIPD RI yang memerlukan waktu.	C	Keterlambatan Pencairan SPJ	1. Perencanaan strategis jangka panjang, menengah dan pendek untuk SKPD. 2. Mengalokasikan alokasi pagu SKPD kedalam Program, 3. Kegiatan, Sub Kegiatan berdasarkan prioritas SKPD. 4. Mengevaluasi realisasi anggaran dan kinerja yang telah ditetapkan.	√					√	1	1	1	Rendah	Pelaksanaan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi dilakukan tepat waktu dan periodik	Kepala Sekretariat
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tertundanya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kesalahan perhitungan gaji PNS dan Non PNS dan kenaikan gaji berkala yang terlambat di laporkan	C	Terlambatnya pembayaran gaji PNS dan Non PNS dan gaji berkala	Merevisi perhitungan pada pergeseran atau perubahan anggaran	√					√	1	1	1	Rendah	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala	Kepala Sekretariat
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tidak tersedianya laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran masih dalam bentuk softcopy	C	Laporan keuangan belum bisa digunakan	Riview atasan	√					√				Rendah	Menyegerakan untuk mengeluarkan laporan keuangan semesteran dalam bentuk hardcopy	Kepala Sekretariat
			Terhambatnya penyediaan bahan cetak	Kurang tertibnya pencatatan persediaan	C	Pekerjaan tertunda pelaksanaannya	Pembantu pengurus barang membuat laporan persediaan secara periodik										Rendah	Petugas segera melaporkan apabila bahan cetak mulai sedikit	Kepala Sekretariat
			Terlambatnya pembayaran uang Lembur	Pekerjaan selesai tepat waktu	UN	Tidak terbayarnya uang lembur	-	√					√	1	1	1	Rendah	-	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		
1	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terhambatnya Penyediaan ATK	Kurang tertibnya pencatatan persediaan	C	Pekerjaan tertunda pelaksanaannya	Pembantu pengurus barang membuat laporan persediaan secara periodik	√					√	1	1	1	Rendah	Fotocopy bukti pembelian ATK segera setelah diserahkan kepada pembantu pengurus barang, laporan persediaan lebih ditertibkan	Kepala Sekretariat
			Terhambatnya penyediaan bahan cetak	Kurang tertibnya pencatatan persediaan	C	Pekerjaan tertunda pelaksanaannya	Pembantu pengurus barang membuat laporan persediaan secara periodik	√					√	1	1	1	Rendah	Petugas segera melaporkan apabila bahan cetak mulai sedikit	

No.	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Sebab	UC/C	Dampak	Pengendalian yang ada					Probabilitas	Dampak	Tingkat Risiko (TR)	Peringkat Risiko (PR)	RTP			
							Uraian	Desain		Efektifitas						Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko		
								A	T	TE	KE							E	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tidak tersedianya komponen instalasi listrik	Kekurangan penyediaan komponen instalasi listrik	C	Aktivitas di ruangan gelap	Koordinasi	√					√	1	1	1	Rendah	Peninjauan kembali komponen listrik yang dibutuhkan	Kepala Sekretariat
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Terhambatnya Penyediaan ATK	Kurang tertibnya pencatatan persediaan	C	Pekerjaan tertunda pelaksanaannya	Pembantu pengurus barang membuat laporan persediaan secara periodik	√					√	1	1	1	Rendah	Fotocopy bukti pembelian ATK segera setelah diserahkan kepada pembantu pengurus barang, laporan persediaan lebih ditertibkan	Kepala Sekretariat
			Terhambatnya penyediaan bahan cetak	Kurang tertibnya pencatatan persediaan	C	Pekerjaan tertunda pelaksanaannya	Pembantu pengurus barang membuat laporan persediaan secara periodik	√					√	1	1	1	Rendah	Segera melaporkan apabila bahan cetak mulai sedikit	
			Kehadiran peserta rapat koordinasi rendah	Tidak terlaksana secara maksimal rapat koordinasi dan konsultasi	C	Tujuan rapat tidak tercapai	Penyampaian undangan tidak mendadak	√					√	2	2	4	Rendah	Pencermatan penjadwalan kegiatan	
3	Sub Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Terhambatnya penyediaan Cetakan dan Penggandaan	Kurang tertibnya pencatatan persediaan	C	Pekerjaan tertunda pelaksanaannya	Pembantu pengurus barang membuat laporan persediaan secara periodik	√					√	1	1	1	Rendah	Segera melaporkan apabila bahan cetak mulai sedikit	Kepala Sekretariat
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terhambatnya perjalanan dinas biasa	Kesulitan dalam pengurusan surat tugas dan tidak cukupnya anggaran		Tidak terlaksananya kegiatan	Penyampaian undangan tidak mendadak dan pengusulan surat tugas H-7 sebelum tanggal penugasan.	√					√	1	1	1	Rendah	Menjadwalkan tanggal perjalanan dinas dan menambah anggaran pada Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di tahun berikutnya	Kepala Sekretariat
			Terhambatnya perjalanan dinas ke dalam daerah	Tidak cukupnya anggaran		Tidak terlaksananya kegiatan	Perubahan anggaran perjalanan dinas dalam daerah	√					√	1	1	1	Rendah	Meminta penambahan anggaran untuk perjalanan dinas tahun berikutnya.	Kepala Sekretariat
5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kondisi Penyimpanan Arsip Belum sesuai SOP	Belum adanya sarana prasarana terkait penyimpanan arsip	UC	Penyimpanan Arsip tidak sesuai sebagaimana mestinya	Penataan Arsip dilakukan secara manual	√					√	3	3	9	Tinggi	Penyediaan sarana prasarana penyimpanan arsip sesuai standar	Kepala Sekretariat
6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Informasi	Jaringan komunikasi data yang lambat/sering putus	Aplikasi dan ketersediaan jaringan belum optimal	C	Aktivitas pekerjaan menjadi terhambat	Riview Atasan	√					√	1	1	1	Rendah	Peningkatan koordinasi terhadap pihak terkait	Kepala Sekretariat
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		

No.	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Sebab	UC/C	Dampak	Pengendalian yang ada								Probabilitas	Dampak	Tingkat Risiko (TR)	Peringkat Risiko (PR)	RTP	
							Uraian	Desain		Efektifitas				Rencana Tindak Pengendalian					Pemilik Risiko	
								A	T	TE	KE	E								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tidak terpenuhi	PLN prepaid sehingga listrik otomatis terputus jika token habis.	C	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan	Token harus selalu tersedia	√					√	1	1	1	Jarang Terjadi	Petugas rutin mengecek sisa token listrik.	Kepala Sekretariat	
			Penyediaan air tidak terpenuhi	Terlambatnya pembayaran tagihan listrik	C	Terputusnya aliran air	Segera membayar setiap bulan setelah tagihan keluar	√					√	1	1	1	Rendah	Terbisa pembayaran setiap bulan	Kepala Sekretariat	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terhambatnya pembayaran sewa tempat tambat speedboat	Keterlambatan pembayaran tambat speedboat oleh petugas	C	Berpotensi pemilik tidak menyediakan tempat tambat speedboat	Sewa tempat tambat speedboat dibayar setelah bulan berjalan setiap bulannya	√					√	1	1	1	Rendah	Terbisa pembayaran setiap bulan	Kepala Sekretariat	
			Terhambatnya pembayaran sewa bangunan gedung kantor	Belum disahkannya DPA	C	Pemilik gedung tidak memperpanjang sewa gedung kantor	Koordinasi dengan pemilik gedung	√					√	3	2	6	Sedang	Terbisa pembayaran setiap tahun	Kepala Sekretariat	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Telambatnya pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	Keterlambatan penyerahan SPJ Honorarium Penanggungjawab keuangan	C	Keterlambatan pembayaran Honorarium Penanggungjawab keuangan	Rutin mempersiapkan SPJ Honorarium Penanggungjawab keuangan	√					√	1	1	1	Rendah	Terbisa SPJ dan diserahkan ke bendahara setiap bulan	Kepala Sekretariat	
			Telambatnya pembayaran honorarium pengadaan barang dan jasa	Keterlambatan penyerahan SPJ Honorarium pengadaan barang dan jasa	C	Keterlambatan pembayaran Honorarium pengadaan barang dan jasa	Rutin mempersiapkan SPJ Honorarium pengadaan barang dan jasa	√					√	1	1	1	Rendah	Terbisa SPJ dan diserahkan ke pengadaan barang dan jasa setiap bulan	Kepala Sekretariat	
			Terhambatnya kegiatan kantor bahan cetak	Ketidaksiediaan barang cetakan dan penggandaan	C	Keterlambatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pembantu pengurus barang membuat laporan persediaan secara periodik	√					√	1	1	1	Rendah	Koordinasi terhadap pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Kepala Sekretariat	
			Terhambatnya alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Alat kebersihan yang sering rusak/hilang pada saat setelah digunakan	C	Tertundanya pelaksanaan pekerjaan	Memantau stok alat kebersihan secara periodik / rutin	√					√	1	1	1	Rendah	Membeli alat kebersihan dengan kualitas bagus sehingga tidak cepat rusak dan pengendalian dalam penggunaan alat kebersihan	Kepala Sekretariat	
			Adanya keterlambatan dalam pengajuan proses pengadaan pakaian dinas harian	Pihak penyedia belum memahami tahapan dalam proses pengadaan	C	Pengadaan tidak selesai tepat waktu	Konsultasi dan koordinasi kepada pihak pejabat pengadaan	√					√	1	1	1	Rendah	Membuat time schedule proses pengadaan barang dan jasa	Kepala Sekretariat	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terhambatnya penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kurangnya anggaran pelaksanaan dinas untuk pelaksanaan perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor karena harus dilakukan diluar daerah.	C	Menumpuknya pajak kendaraan bermotor	Menganggarkan perjalanan dinas keluar daerah.	√					√	3	3	9	Tinggi	Menganggarkan perjalanan dinas ke luar daerah untuk pembayaran pajak kendaraan	Kepala Sekretariat	
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terhambatnya pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat pendingin	Terlambatnya service Ac	C	Ketidaknyamanan ruang kerja	Rutin menservice sesuai jadwal yang sudah ditentukan	√					√	1	1	1	Rendah	Menjadwalkan service rutin	Kepala Sekretariat	

No.	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Sebab	UC/C	Dampak	Pengendalian yang ada								Probabilitas	Dampak	Tingkat Risiko (TR)	Peringkat Risiko (PR)	RTP	
							Uraian	Desain		Efektifitas				Rencana Tindak Pengendalian					Pemilik Risiko	
								A	T	TE	KE	E								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Terhambatnya pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer	Terlambatnya service komputer/notebook	C	Mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan	Rutin menservice sesuai jadwal yang sudah ditentukan	√					√	1	1	1	Rendah	Menjadwalkan service rutin	Kepala Sekretariat	
			Terhambatnya pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal komputer	Terlambatnya service printer	C	Mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan	Rutin menservice sesuai jadwal yang sudah ditentukan	√					√	1	1	1	Rendah	Menjadwalkan service rutin	Kepala Sekretariat	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA																				
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN																				
1 Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																				
1	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (PerJenis Ancaman Bencana)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Belum optimalnya kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara	Minimnya anggaran	c	Tidak terlalu banyak warga negara yang dapat tersosialisasikan informasi rawan bencana	Melalui kantor kecamatan melakukan sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi	X			X			2		1	2	Mengusulkan penambahan anggaran sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
2 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																				
1	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Belum optimalnya kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi untuk warga negara	Minimnya anggaran	C	Tidak banyak warga negara dan kelompok rentan yang dapat mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi	Melakukan kegiatan melalui ketua kelompok dan perwakilan kelompok Destana/katana di desa/kecamatan	X		X				1	2	1	2	Mengusulkan penambahan anggaran pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK																				
1	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Belum optimalnya pelayanan pusdalops dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.	Keterbatasan personil untuk pelaksanaan kegiatan pusdalops dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan bencana yang dihadapi	C	Tertundanya pelaksanaan pekerjaan	Memberikan dukungan kepada anggota pusdalops	√			√			2	2	4	Sedang	Mengusulkan dan mengawal penambahan anggaran kegiatan	Kabid Kedaruratan dan Logistik	
2 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																				
1	Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Belum tersedianya SDM kebencanaan	Belum pernah dilaksanakan Bimtek maupun pelatihan	UC	Koordinasi yang belum maksimal	Melakukan monitoring		√		√			2	2	4	Sedang	Mengusulkan anggaran pelatihan untuk tenaga SDM	Kabid Kedaruratan dan Logistik	
2	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1x24 Jam	Belum memiliki Peraturan Bupati tentang Batingsor	Masih menggunakan SK Bupati	UC	Batas waktu SK lebih pendek	Melakukan koordinasi	√			√			2	2	4	Sedang	Membuat Perbup tentang batingsor	Kabid Kedaruratan dan Logistik	

No.	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Sebab	UC/C	Dampak	Pengendalian yang ada								Probabilitas	Dampak	Tingkat Risiko (TR)	Peringkat Risiko (PR)	RTP	
							Uraian	Desain		Efektifitas			Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko						
								A	T	TE	KE	E								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
3	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Belum maksimalnya upaya untuk menemukan, menolong, maupun memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman	Tidak terukurnya kebencanaan yang terjadi	UC	Koordinasi yang belum maksimal	Melakukan koordinasi dan monitoring	√			√			2	2	4	Sedang	Mengusulkan dan mengawal penambahan anggaran kegiatan	Kabid Kedaruratan dan Logistik	
4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Belum maksimalnya logistik yang dibutuhkan	Tidak terukurnya kebencanaan yang terjadi.	UC	Distribusi logistik yang tidak maksimal	Koordinasi dengan SKPD terkait dan Provinsi.	√				√		2	2	4	Sedang	Melakukan peningkatan koordinasi terhadap pihak terkait	Bidang Kedaruratan dan Logistik	
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI																				
4	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana																			
1	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Tidak Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Minimnya Alokasi Dana	UC	Keterlambatan Penanganan Bencana, Kerentanan pada Penyalahgunaan Wewenang dan Kerugian Sosial dan Ekonomi yang Lebih Besar	efisiensi alokasi dana yang ada pada penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten Kubu Raya	√			√			1	4	4	Sedang	Meningkatkan alokasi dana yang ada pada penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten Kubu Raya	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
2	Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	tidak terlaksana dan atau terlambatnya Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten	1. Keterbatasan Sumber Daya; tenaga manusia, infrastruktur, teknologi, maupun anggaran; 2. Kurangnya Kapasitas dan Kompetensi Pejabat Lokal; 3. Minimnya Kesadaran atau Kepedulian terhadap Pentingnya Koordinasi.	UC	Pemulihan yang Lambat, Kerusakan Jangka Panjang pada Ekonomi Lokal, Gangguan dalam Kehidupan Sosial dan Masyarakat dan Dampak Lingkungan yang Tidak Terkelola	optimalisasi alokasi dana yang sudah ada dan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan online	√			√			3	4	12	Tinggi	Meningkatkan alokasi dana yang sudah ada dan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan online	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
3	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Tidak Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab Kubu Raya yang sah dan legal	1. Kurangnya Kapasitas dan Sumber Daya, 2. Minimnya Koordinasi Antar instansi, 3. Kurangnya Pemahaman atau Kesadaran tentang Pentingnya JITUPASNA dan R3P, 4. Keterbatasan Data dan Informasi, 5. Keterbatasan Waktu dan Tekanan Pascabencana	UC	1. Pemulihan yang Tidak Terarah dan Tidak Efektif, 2. Kesalahan dalam Alokasi Sumber Daya, 3. Tidak Ada Prioritas dalam Penanganan Pascabencana, 4. Terhambatnya Penyusunan Program Pengurangan Risiko Bencana ke Depan	optimalisasi alokasi dana, melakukan komunikasi yang efektif kepada stake holder dan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan online	√			√			3	9	27	Tinggi	Meningkatkan alokasi dana, melakukan komunikasi yang efektif kepada stake holder dan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan online	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																				
BIDANG PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN SARANA PRASARANA																				
5	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran																			

No.	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Sebab	UC/C	Dampak	Pengendalian yang ada								Probabilitas	Dampak	Tingkat Risiko (TR)	Peringkat Risiko (PR)	RTP				
							Uraian	Desain		Efektifitas				15					16	17	18	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko
								A	T	TE	KE	E											
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Belum Terlaksana Kegiatan Pelatihan dan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa/Kelurahan	Terhambatnya Pembuatan Pakaian Baju dan Topi Relawan Pemadam Kebakaran Dari Pihak Penyedia, dikarekan antri untuk pembuatan Baju dan Topi	UC	Tertundanya kegiatan Pelatihan dan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa/Kelurahan	Pelatihan dan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran di Tingkat Desa/Kelurahan	√	-	-	-	√	1	1	1	Jarang Terjadi	Selalu Koordinasi Kepada Pihak Penyedia agar di percepat dalam Pembuatan Pakaian Baju dan Topi Karena Kegiatan akan di laksanakan Bulan September 2024	Kabid Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana					